

FAKTOR – FAKTOR PENDORONG PERAN AKTIF INDONESIA DALAM KERJASAMA CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY (CTI-CFF) TAHUN 2006-2014

Ni Luh Ketut Ayu Irayani¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, Anak Agung Ayu Intan Parameswari³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Ayuirayani84@gmail.com¹⁾, idinfasisaka@yahoo.com²⁾, prameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Coral triangle area is one of the centre world biodiversity. The region served as source of livelihood, coastal organism breeds location, and also contribute in address global warming issue. However, the coral triangle area, experienced severe damages caused by destructives human activity . Refers to the currents circumstance, Indonesia call for collective engagement to save the biodiversity in the region. The efforts finally resulted in the form of cooperation Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CFF) by the six member of CT6. Indonesia persistently make the CTI-CFF as fundamental building block for well established cooperation amongst state member in the region. This research would like to analyse the factor that triggered active role involvement by the Indonesia government in the CTI-CFF. There are several concept to be used in this research, such as rational model actor and internal-external factor.

Key Words : *Coral Triangle Initiative, CTI-CFF, Rational Actor Model, Internal-External Factor.*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan yang terjadi di kawasan segitiga terumbu karang mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, tidak terkecuali negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Kawasan segitiga terumbu karang merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat biodiversitas (keanekaragaman hayati) dunia. Kawasan tersebut berupa perairan lintas negara yang meliputi yurisdiksi enam negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Kepulauan Solomon (Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2009).

Sebagai pusat biodiversitas laut dunia yang dijuluki *amazone of the seas*,

kawasan segitiga terumbu karang memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Kawasan tersebut menjadi sumber pangan yang potensial, lokasi pengembangbiakan berbagai jenis organisme laut serta berkontribusi dalam menangani permasalahan pemanasan global (Nikijuluw, 2013, p. 298). Namun ancaman kerusakan sumber daya hayati laut telah terjadi di kawasan segitiga terumbu karang. Ancaman terbesar berupa kerusakan ekosistem terumbu karang yang mencapai hingga 90% yang mana aktivitas manusia menjadi penyebab utama kerusakan di kawasan tersebut (World Research Insitute, 2013).

Sekretaris Eksekutif Sekretariat Regional Interim CTI-CFF, Eko Rudinto menyebutkan bahwa upaya penyelamatan sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1990-an oleh para pakar dan *Non Governmental Organization* (NGO). Namun, upaya tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal karena hanya berupa aktivitas-aktivitas terbatas seperti pengumpulan data, promosi, dan pengadaan proyek-proyek parsial (Rudianto, n.d). Keterlibatan otoritas yang lebih tinggi menjadi hal yang mendesak, mengingat kawasan tersebut memiliki prinsip konektivitas dan bersifat lintas batas (*transboundary*). Oleh sebab itu pendekatan antar negara menjadi salah satu solusi yang diyakini dapat dilakukan untuk penyelamatan yang lebih luas dan efektif (Nikijuluw, 2013, p. 282).

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dengan wilayah terluas di kawasan tersebut. Pada tahun 2006 Indonesia mulai menginisiasi upaya penyelamatan sumber daya hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang. Melalui suatu inisiatif yang dikenal dengan *Coral Triangle Initiative* (CTI), Indonesia secara aktif mengajak negara-negara terutama negara yang berada di kawasan segitiga terumbu karang (CT6) untuk melakukan upaya penyelamatan di kawasan tersebut. Upaya persuasif Indonesia akhirnya memperoleh hasil pada bulan Mei 2009 dengan disepakati secara resmi kerjasama *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) oleh negara CT6

serta didukung oleh USA, Australia dan beberapa lembaga internasional (Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I, 2009).

Pada tahun 2014, negara CT6 sepakat untuk menjadikan CTI-CFF sebagai organisasi permanen pada tingkat regional melalui pembentukan Sekretariat Regional CTI-CFF yang bertempat di Manado Indonesia (Antara Kaltim, 2014).. Pada konteks tersebut Indonesia telah menunjukkan konsistensinya dan mengarah kepada proses institusionalisasi menangani permasalahan lingkungan hidup. Indonesia sebagai aktor rasional penting mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

Berikut dipaparkan mengenai beberapa literatur, yang digunakan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini. Literatur yang pertama berupa buku yang berjudul *Essence of Decision* yang disusun oleh Graham T. Allison pada tahun 1971. Pada buku tersebut, Allison mencoba memberikan analisis terkait bagaimana proses pengambilan keputusan berjalan, dengan menggunakan konsep model aktor rasional. Sebagai aktor rasional, sikap aktor yakni negara dalam hal ini diambil berdasarkan kalkulasi yang strategis khususnya pada *variable cost* dan *benefit*. Arus perpindahan informasi yang begitu

cepat serta ketepatan informasi yang diperoleh aktor, menurut Allison merupakan satu dari sekian faktor penentu keberhasilan proyeksi kebijakan dari seorang aktor rasional.

Secara substansi buku yang disusun oleh Allison memberikan kontribusi dalam menyusun kerangka berpikir terkait model aktor rasional. Selain itu model aktor rasional yang dipaparkan oleh Allison memberikan pedoman pada penelitian ini, bahwa sesungguhnya sebagai aktor rasional, negara dalam situasi yang serba tidak pasti dituntut untuk melakukan kalkulasi *cost* dan *benefit* terhadap kebijakan serta melakukan proyeksi strategis diantara alternatif konsekuensi yang akan timbul dan pada akhirnya melakukan proses evaluasi kebijakan. Oleh sebab itu konsep model aktor rasional akan digunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF.

Literatur yang kedua adalah penelitian yang berjudul Analisa kebijakan Luar Negeri pada *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership* (IAFCF) tahun 2006-2008 yang ditulis oleh Isyia Amanda. Penelitian tersebut memaparkan pertimbangan Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri pada IAFCF. IAFCF merupakan program yang ditawarkan oleh Australia kepada Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai konsekuensi dari Protokol Kyoto. Kajian tersebut menggunakan teori *rational choice* yang mana model yang digunakan adalah model aktor rasional Graham T. Allison.

Menurut Allison dalam kajian tersebut, kebijakan luar negeri yang dirumuskan suatu negara memiliki dimensi rasionalitas. Terdapat empat komponen yang menjadi acuan dalam rasionalitas Indonesia dalam pertimbangan kemitraan IAFCF yaitu *goals (objectives)*, *options*, *consequence* dan *choice* sebagai pilihan rasional untuk menerima kerjasama. Secara substansi penelitian yang ditulis Isyia Amanda telah memberikan kajian terkait urgensi penyelesaian terhadap permasalahan lingkungan yang dibahas melalui studi kasus IACAF. Selain itu model aktor rasional yang digunakan dalam penelitian tersebut membantu dalam membangun kerangka berpikir dalam menganalisa tindakan luar negeri suatu negara.

Literatur yang ketiga adalah jurnal yang berjudul Efektifitas Indonesia untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Laut dalam *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* yang ditulis oleh Ridona pada tahun 2015. Menurut Ridona efektifitas Indonesia untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dalam kerjasama CTI-CFF sudah efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan peran aktif yang dilakukan Indonesia sejak penggagasan kerjasama hingga terbentuknya institusi CTI-CFF. Tindakan tersebut menjadi salah satu bentuk penanganan bersama dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup global.

Secara substansi jurnal yang ditulis Ridona memberikan kajian yang mendalam terkait peran aktif Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati

laut melalui CTI-CFF. Peran aktif tersebut diwujudkan dengan melakukan diplomasi dengan mengkonstruksi sebuah pemikiran bahwa dengan dibentuknya wilayah konservasi laut dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi dampak pemanasan global. Hal tersebut membantu dalam memahami signifikansi keterlibatan Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF.

2.2. KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.1. Model Aktor Rasional

Konsep model aktor rasional dalam analisa politik luar negeri pertama kali diperkenalkan oleh Graham T. Allison. Konsep tersebut digunakan untuk menganalisa perilaku negara dalam memproyeksikan serta memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Konsep model aktor rasional mengasumsikan negara sebagai unit pokok yang memainkan peranan sentral dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Negara membangun proyeksi atas situasi disekitar pembuatan keputusan dan mendefinisikan beberapa pilihan yang diyakini mampu membawa kepentingan pada keberhasilan. Orientasi nilai, *idiosinkretis* atau pandangan subjektif aktor, geografis, interaksi internal dalam unit aktor beserta preferensi pilihan strategis merupakan variabel yang membuat aktor rasional memperhitungkan langkah yang akan diambil (Allison, 1971).

Menurut Slantchev (2005) konsep aktor rasional merupakan refleksi perilaku yang ditunjukkan secara sengaja (*purposeful behavior*) terhadap beragam situasi disekitar lingkungan pembuatan kebijakan.

Pada prosesnya, model aktor rasional memandang kebijakan luar negeri sebagai sebuah *output* yang didasarkan pada proses pertimbangan kerugian (*cost*) maupun keuntungan (*benefit*). Negara sebagai aktor rasional diharapkan bertindak atas motivasi dalam memperoleh keuntungan sebagai hasil yang diharapkan (*expected goal*).

Selanjutnya Bekemans (1980), mengemukakan bahwa penerapan model aktor rasional yang sempurna, dalam situasi interdependensi yang kompleks memerlukan ketepatan rangkaian informasi yang lengkap, pengetahuan utuh terhadap kerugian yang timbul dan ekspektasi hasil yang akurat. Kemampuan prediktif yang terbatas dari model aktor rasional merupakan kelemahan yang tidak dapat dihindari. Pada situasi yang demikian, definisi aktor terhadap lingkungan dan struktur informasi yang ada menjadi *input* bagi pembuatan kebijakan. Hal tersebut ditujukan untuk *expected goal* yang ingin dicapai dengan tingkat *cost* sekecil mungkin. Terdapat pengkategorian interaksi aktor rasional kedalam tiga analisa yaitu : *the actors, the environment in which they act, dan how outcomes are produced from the actors* (Slantchev, 2005).

Allison menyertakan empat komponen dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, diantaranya ;

1. Tujuan (*goals and objectives*) yaitu, komponen yang bersifat prinsip dalam proses pengambilan keputusan model aktor rasional.
2. Pilihan alternatif / *alternatives options*, yang dihasilkan berdasarkan daya

- jelajah aktor dalam memahami kekuatan serta kelemahan yang dimiliki.
3. Konsekuensi atas pilihan alternatif kebijakan yang diambil.
 4. Pilihan rasional yang paling mampu memberikan peluang terwujudnya tujuan (Allison, 1971).

2.2.2. Faktor Internal-Eksternal

Kajian mengenai analisa politik luar negeri, dipahami sebagai serangkaian proses yang berkenaan dengan perumusan, perbandingan dan pengambilan keputusan yang menjadi landasan bagi tercapainya kepentingan negara dalam hubungan internasional. Setiap aspek dalam pengambilan keputusannya dilandasi atas analisa terlebih dahulu terhadap perubahan lingkungan pembuatan keputusan (*psycho milieu*) individu maupun kelompok pembuat keputusan. Harlord dan Magareth Sprout dalam Hara (2011) mengemukakan pentingnya skema *setting*, berupa rangkaian analisa terkait bagaimana situasi internal dan eksternal yang turut memberikan kontribusi pada pilihan strategis kebijakan luar negeri. Skema *setting* tersebut menjadai salah satu aspek yang bersifat esensial dalam kajian analisa politik luar negeri.

Sejalan dengan Harold dan Margareth Sprout, Ricard Synder, H,W Burck, dan Burton Sapin (1962) mengemukakan bahwa kondisi dan situasi dalam pembuatan kebijakan luar negeri secara umum diejewantakan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut dapat

mempengaruhi persepsi, tujuan serta perilaku para pembuat kebijakn luar negeri (Hara, 2011). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari internal suatu negara atau (determinan domestik) seperti letak geografis, kondisi sumber daya alam, struktur sosial masyarakat, ideologi yang dianut, aspek kepemimpinan, teknologi, serta opini masyarakat. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar batas wilayah negara seperti sistem internasional, rezim internasional serta berbagai hubungan bilateral maupun multilateral dalam lingkungan internasional.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memaparkan faktor-faktor pendorong peran aktif Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF tahun 2006-2014. Sumber data berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, *website* resmi organisasi terkait, pemberitaan media massa dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Tingkat analisa adalah negara bangsa yang mana perilaku individu, kelompok organisasi dan lembaga akan diperhatikan sebagai representasi dari negara hubungan internasional (Mas'oed, 1994). Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka yang mana data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan konsep pada penelitian dan disajikan dalam bentuk narasi teks yang didukung dengan gambar, tabel maupun grafik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Kerjasama Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)

Kerjasama *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) merupakan kerjasama multilateral yang dibentuk secara resmi pada tahun 2009. Terbangunnya kerjasama tersebut berawal dari keprihatinan Indonesia terhadap kerusakan sumber daya hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang. Kawasan segitiga terumbu karang merupakan kawasan perairan dengan luas sekitar 75.000 km², yang meliputi yurisdiksi enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua New Guine, Timor Leste dan kepulauan Solomon. Keenam negara dikenal sebagai negara CT6 (Satria, 2012).

Menurut laporan *World Resources Institute* (WRI) pada tahun 2012, ancaman terbesar di kawasan segitiga terumbu karang adalah kerusakan ekosistem terumbu karang yang merupakan rumah bagi berbagai jenis organisme laut. Presentase ancaman mencapai 90% dan hampir 45% dikategorikan sebagai ancaman tinggi / sangat tinggi. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*), polusi pada daerah aliran sungai, dan pembangunan kawasan pesisir yang eksploitatif. Aktivitas tersebut menimbulkan ancaman

mencapai 85%, sementara 5% ancaman berasal dari pemutihan karang (*coral bleaching*) yang didorong oleh kenaikan suhu laut (Burke at al 2012, p. 2).

Disisi lain, kerusakan di kawasan segitiga terumbu karang telah mendapatkan sorotan dari berbagai pihak karena kawasan tersebut merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Terdapat sekitar 500 atau 76% jenis karang dan 3000 atau 37% jenis ikan di dunia yang hidup di kawasan tersebut (Blinch, 2011, p. 156). Sebagai pusat biodiversitas laut dunia, terdapat empat kontribusi yang diberikan kawasan segitiga terumbu. Pertama, kawasan tersebut menjadi sumber pangan bagi 120 juta dari 360 juta atau sekitar 33% penduduk di enam negara, serta milyaran manusia di seluruh dunia melalui sektor perikanan (Foale, et al., 2013). Kedua, kawasan tersebut merupakan lokasi yang baik untuk pemijahan dan pengembangbiakan berbagai jenis organisme laut (CTI-CFF Indonesia, 2008). Ketiga, berkontribusi dalam menangani permasalahan pemanasan global, karena laut dapat menyerap karbon dioksida (*carbon sink*) dunia (Dahuri, 2003). Keempat memberikan kontribusi pada sektor pariwisata yang diproyeksikan mampu memberikan pendapatan hingga 12 milyar USD dollar pertahun (Sindotrijaya, 2013).

Menanggapi kondisi yang demikian, keberadaan kerjasama CTI-CFF menjadi sangat penting di kawasan segitiga terumbu karang. Oleh sebab itu, pada tahun 2014 kerjasama CTI-CFF

telah menjadi institusi permanen di tingkat regional (Coral Reef Rehabilitation and Management Program, 2009). Proses pendirian CTI-CFF melalui tiga tahapan yaitu tahap inisiasi, tahap kesepakatan kerjasama dan tahap institusionalisasi.

Tahap inisiasi merupakan tahap, ketika Indonesia mulai menggulirkan inisiatif CTI sebagai upaya penyelamatan di kawasan segitiga terumbu karang. Tahap kesepakatan kerjasama dilakukan pada tahun 2009, yang ditandai dengan diadopsinya *Regional Plan of Action* (RPOA) CTI yang diimplementasikan melalui *National Plan of Action* (NPOA) oleh negara CT6. RPOA memiliki lima tujuan yaitu; 1) pengelolaan efektif bentang laut (*seascape*), 2) pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem, 3) pengelolaan efektif kawasan konservasi laut, 4) proses adaptasi perubahan iklim global di tingkat regional, nasional dan lokal 5) meningkatkan manajemen *species* yang terancam punah. Tahap yang terakhir adalah tahap institusionalisasi kerjasama menjadi institusi permanen. Hal tersebut ditandai dengan kesepakatan pembentukan Sekretariat Regional CTI-CFF pada tahun 2014 oleh negara CT6 bertempat di Manado, Indonesia .

4.1.2. Peran Aktif Indonesia dalam Kerjasama CTI-CFF

Terdapat dua peran aktif Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF, yaitu dalam konteks Internasional dan domestik. Pada konteks internasional, Indonesia telah aktif dalam

memprakarsai kerjasama, mendorong proses institusionalisasi menjadi institusi permanen serta menjadi tuan rumah Sekretariat Permanen CTI-CFF. Secara domestik, Indonesia melakukan peningkatan dan penguatan *National Coordinating Committee Coral Triangle Initiative* (NCC CTI) serta sinkronisasi program CTI-CFF dari tingkat nasional hingga daerah melalui lokakarya nasional. Indonesia membentuk NCC CTI Indonesia pada tahun 2009, yang terdiri dari beberapa perwakilan kementerian, akademis, NGO dan berbagai pihak yang terkait kerjasama CTI-CFF (NCC Indonesia, 2014).

4.2. Faktor-Faktor Pendorong Peran Aktif Indonesia dalam Kerjasama CTI-CFF

Sesuai dengan konsep model aktor rasional, yang dikemukakan oleh Allison (1971) terdapat empat komponen yang menyertai suatu negara dalam pembuatan kebijakan luar negeri yaitu tujuan, pilihan alternatif, konsekuensi dan pilihan rasional. Indonesia memiliki tujuan untuk menyelamatkan sumber daya hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang. Tujuan tersebut dikemukakan Presiden RI pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono yang tertuang dalam pidatonya pada pertemuan COP-8 CBD (*Convention on Biological Diversity*) di Brazil tahun 2006 (Witoelar, 2013). Tujuan tersebut tentunya, memiliki substansi yang bersifat berkelanjutan, mengingat kawasan segitiga terumbu karang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Disisi lain Indonesia yang

secara geografis berada di jantung segitiga terumbu karang, telah mendorong adanya tindakan konkrit untuk mengatasi *domino effect* dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dari kerusakan lingkungan yang terjadi dikawasan tersebut.

Berdasarkan tujuan yang dimiliki Indonesia, secara umum terdapat dua alternatif kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, berperan aktif dalam kerjasama CTI-CFF sehingga terdapat *platform* bersama untuk membahas serta memecahkan permasalahan di kawasan segitiga terumbu karang. Kedua, membuat kebijakan yang mengarah pada pemecahan permasalahan lingkungan di kawasan secara internal oleh Indonesia yang berarti Indonesia memiliki alternatif untuk tidak membangun kerjasama CTI-CFF. Namun pada perkembangannya alternatif yang pertama menjadi pilihan Indonesia.

Terdapat konsekuensi dari kebijakan Indonesia untuk membangun kerjasama CTI-CFF yang tertuang kedalam keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) dalam pembuatan kebijakan. Keuntungan yang diperoleh diantaranya; pertama, penyelamatan terhadap sumber daya hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang dapat dilakukan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya mekanisme forum regional yang mawadahi segala bentuk komunikasi antar negara dan mitra kerjasama dalam upaya penyelamatan sumber daya hayati laut. Kedua, Indonesia mampu memaksimalkan kepentingannya dalam sektor maritim, karena sumber daya alam yang bersifat

konektivitas dan terbuka memungkinkan untuk adanya eksploitasi dari berbagai pihak, sehingga di butuhkan adanya suatu mekanisme dalam pengelolaan terhadap sumber daya alam tersebut (Magdalena, 2016). Ketiga, meningkatnya citra positif Indonesia di mata internasional karena berupaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang memiliki implikasi dalam skala domestik, regional dan global. Hal tersebut dapat memberikan peluang kepada Indonesia untuk dapat dilibatkan diberbagai forum internasional terkait isu lingkungan serta akses terhadap bantuan finansial dan bantuan teknis (*technical assisantance*).

Disamping keuntungan, Indonesia mempertimbangkan pula kemungkinan kerugian dari tindakan aktif dalam kerjasama CTI-CFF. Adapun kemungkinan kerugian tersebut diantaranya pertama, Indonesia membuka akses terhadap segala informasi terkait sumber daya yang ada di Indonesia kepada pihak-pihak asing. Hal tersebut dapat memberikan peluang bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya hayati laut Indonesia. Kedua tidak menutup kemungkinan akan adanya intervensi secara persuasif dari pihak luar yang memiliki *power* lebih kuat terhadap Indonesia melalui kerjasama CTI-CFF, karena *power* suatu negara memiliki pengaruh terhadap negara lainnya dalam hubungan internasional (Mas'oed, 1994).

Berdasarkan proses kalkulasi untung dan rugi, sebagai aktor rasional Indonesia memilih untuk berperan aktif dalam kerjasama CTI-CFF. Keuntungan

yang diperoleh Indonesia cenderung lebih besar dari pada kerugiannya. Oleh sebab itu keuntungan tersebut dapat menjadi daya dorong adanya tindakan aktif Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep faktor internal-eksternal faktor-faktor pendorong peran aktif Indonesia akan merujuk pada kondisi dan situasi yang menjadi latar belakang kebijakan yang dilakukan. Dengan demikian faktor-faktor pendorong peran aktif Indonesia didasarkan pada situasi dan kondisi faktual pada saat itu yang dielaborasi dengan kalkulasi keuntungan yang akan diperoleh Indonesia.

4.2.1. Faktor Internal

4.2.1.1. Kondisi Kerusakan Sumber Daya Hayati Laut di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang juga dijuluki sebagai negara maritim karena memiliki luas wilayah daratan 1,9 juta km² dan tersebar pada sekitar 17.504 pulau, serta luas wilayah laut mencapai 3,9 juta km², dengan panjang garis pantai yaitu sekitar 95.181 Km² (Lasabuda, 2013). Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia disebut sebagai megabiodiversitas dunia. Luas area karang mencapai 51.000 Km², sedangkan luas area mangrove sekitar 35.337 Km² dan luas area lamun mencapai 30.000 Km² (Nikijuluw, 2013, p.300). Pada konteks kawasan segitiga terumbu karang Indonesia merupakan pusat kawasan yang memiliki wilayah terluas dibandingkan dengan negara CT6 lainnya. Terdapat sekitar 2.200 spesies ikan karang di perairan Indonesia yang tersebar luas di

sekitar kawasan segitiga terumbu karang. (Burke, at al 2012, p. 26)

Namun segala potensi laut Indonesia kini dalam kondisi yang terancam dan memprihatinkan. Menurut *survey* yang dipublikasikan oleh COREMAP pada tahun 2007, diperkirakan tutupan karang keras berkurang, sehingga tercatat rata-rata dari tutupan karang hidup sebanyak 26-50%. Kenaikan suhu air laut yang fluktuatif mengakibatkan terjadinya pemutihan karang secara massif di seluruh Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Selain itu, diperkirakan sekitar 95% terumbu karang di Indonesia dalam kategori terancam. Tingkat ancaman akibat kegiatan *over exploitation* ditemukan hampir di semua kawasan terumbu karang, bahkan termasuk di daerah yang terpencil sekalipun dengan presentase hampir 80% mencakup 31.000 Km² di Indonesia (COREMAP, 2007). Pencemaran yang berasal dari daerah aliran sungai (DAS) yang mengancam lebih dari 40% terumbu karang dan pembangunan di wilayah pesisir, termasuk limbah berbahaya dari pembangunan dan limbah dari masyarakat pesisir, berpotensi mengancam sekitar 20% ekosistem terumbu karang (Burke, at al 2012, p. 27) .

Tingginya tingkat kerusakan sumber daya hayati laut memiliki implikasi terhadap masyarakat Indonesia karena adanya ketergantungan masyarakat pada sumber daya hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang. Terdapat sekitar 60 juta penduduk Indonesia yang tinggal dalam jarak 30 kilometer dari terumbu karang (Susanto, 2011). Berdasarkan

kondisi tersebut, Indonesia telah membangun kerjasama CTI-CFF. Sesuai dengan *benefit* dalam kalkulasi untung dan rugi, mekanisme forum dalam kerjasama CTI-CFF mampu menjadi media komunikasi untuk mengkomunikasikan permasalahan kerusakan di kawasan segitiga terumbu karang. Berdirinya sekretariat permanen CTI-CFF serta diadopsinya RPOA CTI-CFF oleh CT6 menjadi bukti efektifitas forum komunikasi dalam kerjasama CTI-CFF.

Efektivitas penyelamatan sumber daya hayati laut dikawasan segitiga terumbu karang dapat ditentukan dari sejauh mana upaya negara CT6 dalam mengimplementasikan NPOA di masing-masing negara. Indonesia telah mengadopsi lima tujuan RPOA yang dituangkan kedalam NPOA Indonesia. Meskipun pada pelaksanaan program-program CTI-CFF terdapat kemungkinan munculnya permasalahan batas-batas wilayah laut, namun hal tersebut dapat diatasi melalui forum CTI-CFF sehingga implementasi program CTI-CFF dapat dimaksimalkan.

4.2.1.2. Kepentingan Pangan Berbasis Maritim

Pangan merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, hak atas pangan menjadi bagian penting dalam hak asasi manusia. Mengacu pada urgensi pangan yang semakin krusial, strategi untuk mewujudkan ketahanan menjadi agenda prioritas bagi negara. Komitmen politik untuk mencapai ketahanan pangan telah

dilakukan oleh negara sejak KTT Pangan Sedunia tahun 1996 di Roma, Italia, yang mana tujuan ketahanan pangan merujuk pada situasi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki akses yang cukup terhadap jumlah pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat, aktif dan bersifat keberlanjutan (Handewi & Ariani 2002).

Meskipun terdapat komitmen mengenai ketahanan pangan, krisis pangan masih terjadi. Terhitung dari tahun 2000 - 2007 dunia sudah mengalami defisit stok pangan lima kali, yaitu tahun 2000, 2002, 2003, 2006, dan 2007. Menurut *Sunday Herald* (2008), krisis pangan kali ini diklaim sebagai krisis pangan global terbesar di abad ke-21, yang menimpa sekitar 36 negara di dunia (Afrianto, 2010). Indonesia merupakan salah satu dari 36 negara yang terkena krisis pangan global. Persoalan krisis pangan menjadi isu dilematis mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Permasalahan pangan sesungguhnya telah diatur dalam undang-undang Indonesia, yaitu UU No.18/2012 tentang pangan.

Di Indonesia sumber pangan masih bertumpu pada sektor agraris. Namun seiring meningkatnya populasi penduduk, ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dari sektor agraris semakin besar karena alih fungsi lahan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan diversifikasi pangan yang mengarahkan pola konsumsi pangan yang beranekaragam sehingga

kebutuhan pangan tidak hanya berfokus pada sektor agraris, tetapi juga sektor lainnya seperti sektor maritim (Tambunan, 2008).

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber pangan dari laut yang sangat melimpah. Produksi pangan dari aspek maritim berkontribusi terhadap ketahanan pangan domestik melalui konsumsi sumber daya hayati laut khususnya ikan yang merupakan salah satu sumber pangan utama. Di Indonesia lebih dari 60% sumber protein berasal dari ikan. Selain itu secara tidak langsung sumber daya hayati laut telah berkontribusi pada ketahanan pangan melalui pendapatan bagi warga masyarakat dari aktivitas dalam sektor perikanan (Nikijuluw, 2013 : 299).

Selain memiliki kontribusi dalam mencapai ketahanan pangan domestik, sektor maritim juga berpotensi dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Konsumsi ikan masyarakat global diprediksi akan mengalami peningkatan karena peningkatan jumlah penduduk yang disertai peningkatan pendapatan, adanya kesadaran terhadap makanan sehat dari *red meat* ke *white meat*, tuntutan makanan yang bersifat universal akibat globalisasi, serta munculnya penyakit hewan sumber protein sehingga produk perikanan menjadi alternatif lain (Kusumastanto, 2008). Berdasarkan kondisi tersebut Indonesia telah mengambil langkah dengan menjadikan sektor maritim sebagai sektor yang strategis.

FAO dalam Year Book 2010, menyebutkan bahwa Indonesia telah

menjadi salah satu produsen produk perikanan dunia (FAO, 2012). Namun, hal itu berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman terhadap penurunan produksi perikanan karena degradasi lingkungan laut serta *over fishing*. Pada tahun 2011 produksi tangkapan laut mencapai 82%, yang berarti telah melampaui batas pemanfaatan optimal yaitu sebesar 80%. Kondisi tersebut diperparah dengan kegiatan *illegal fishing* dengan potensi ikan Indonesia yang dicuri sebesar 25%, sehingga produksi menembus angka 107%. (Greenpeace, n.d.).

Menyikapi permasalahan tersebut serta mengingat urgensi pangan bagi kebutuhan domestik dan global, alternatif kebijakan luar negeri Indonesia mengarah pada adanya kerjasama yang dapat mengatur dalam upaya penanganan yang lebih efektif. Pada kerjasama CTI-CFF telah disepakati tiga pilar yang menjadi sasaran kerjasama yaitu, terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan. Terdapat dua program yang dirancang untuk pencapaian ketahanan pangan berbasis perikanan di negara CT6 yakni, *Marine Protected Area* (MPA) *networks* dan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Menurut (CTI-CFF, 2009).

4.2.2. Faktor Eksternal

4.2.2.1. Perkembangan Isu Lingkungan Hidup Global Serta Respon Indonesia

Kemunculan isu lingkungan hidup global diawali dengan Konferensi Stockholm pada tanggal 5-6 Juni 1972, di

Stockholm, Swedia oleh PBB. Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Stockholm yang merangkum metode penanganan isu lingkungan hidup dengan memuat pendekatan teknologi kedalam implementasinya (Erwin, 2009). Mengacu pada implementasi deklarasi Stockholm, PBB kemudian membentuk UNEP. Mengingat bahwa isu lingkungan tidak mampu diselesaikan secara sektoral dan parsial, maka diperlukan pendekatan baru yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pendekatan ini menurut Faripasha (2009) pertama kali digulirkan oleh *World Commission on Environment and Development* tahun 1987. Terdapat tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan yakni, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pada perkembangannya, PBB kemudian menyelenggarakan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. KTT tersebut menyepakati 27 prinsip pembangunan berkelanjutan dalam *Rio Declaration on Environment and Development* yang berisi kerangka kerjasama strategis pembangunan berkelanjutan dan program dan petunjuk bagi pemerintahan nasional dalam melaksanakan prinsip Rio yaitu, *Convention on Biological Diversity*, *United Nations Framework on Climate Change Convention* dan *Statement of Principles for A Global Consensus on The Management, Conservation, and Sustainable Development of All Types of Forest*. (United Nations, 1992).

Selain KTT Bumi, salah satu capaian paling maju dalam negosiasi dalam

isu lingkungan hidup adalah diadopsinya Protokol Kyoto. Terlepas dari kontroversi mekanisme Protokol Kyoto, dinamika isu lingkungan hidup seperti isu perubahan iklim telah masuk ke dalam agenda politik global yang mendapat perhatian serius dari negara maju maupun negara berkembang. Negara berkembang menghimbau agar negara maju segera melakukan pengurangan emisi gas dari kegiatan industrinya. Namun hal tersebut agaknya sulit untuk dilakukan karena sikap negara-negara maju yang enggan meratifikasi Protokol Kyoto karena kekhawatiran apabila ekonomi domestiknya akan terganggu.

Pertentangan kepentingan terkait isu lingkungan hidup menuai respon berbeda-beda dari masing-masing negara. Dalam konteks tersebut Indonesia menangkap sinyal adanya kepentingan nasional yang mampu diperoleh dalam percaturan isu lingkungan global. Mengingat sumber daya hayati yang dimiliki serta posisi geografis yang strategis mendorong Indonesia untuk mengambil kebijakan sebagai respon atas kepentingan nasional serta *political image* di arena internasional. Pada konteks tersebut respon Indonesia adalah menerapkan kebijakan adaptif yang mendukung penanganan permasalahan lingkungan hidup global (Faripasha, 2009).. Kebijakan tersebut dilakukan melalui diplomasi lingkungan hidup Indonesia. Diplomasi tersebut didukung oleh sumberdaya alam Indonesia serta visi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimanifestasikan kedalam kebijakan luar

negeri, sehingga Indonesia tetap optimis dalam menjalankan praktik dalam isu lingkungan.

Peran aktif Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF menjadi salah satu kebijakan luar negeri untuk merespon permasalahan lingkungan hidup global. Melalui diplomasi lingkungan hidup, Indonesia membangun kerjasama CTI-CFF. Sesuai dengan prinsip yang telah disepakati pada deklarasi Rio, pendekatan pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam rencana aksi regional CTI-CFF. Sasaran kerjasama tersebut adalah pelestarian terumbu karang dan perikanan untuk pencapaian ketahanan pangan. Selain itu dalam upaya implementasi Protokol Kyoto, CTI-CFF juga memuat program dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Disisi lain, peran aktif Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF memberikan *feed back* positif terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian penghargaan *Champion of the Earth* kepada Presiden RI pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dari UNEP pada tahun 2014 karena keberhasilan Indonesia dalam memajukan pelestarian lingkungan termasuk dalam mengatasi permasalahan pemanasan global. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono, juga telah menerima penghargaan *Global Home Tree Award* tahun 2010 dan *Valuing nature Award* tahun 2012 dari TNC, WWF dan WRI (Detik News, 2014)

Citra positif yang diperoleh Indonesia memberikan implikasi pula

terhadap peningkatan *bargaining position* Indonesia dalam hubungan internasional. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat dilibatkan dalam berbagai forum internasional serta adanya akses terhadap sumber finansial dan bantuan teknis dibidang lingkungan hidup. Hingga kini bantuan pendanaan dan teknis telah didapatkan Indonesia dalam kerangka CTI-CFF seperti ABD yang menyepakati bantuan dana sebesar \$66,660 (ABD, 2014) dan akses tenaga ahli dan teknologi CTC (*Coral Triangle Center*), WWF, CI dan TNC dalam kerangka nasional (Ridona, 2015).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF. Faktor-faktor tersebut merujuk pada situasi dan kondisi Indonesia yang dikaitkan dengan kalkulasi *benefit* dan *cost* dari tindakan Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF. Faktor internal terdiri dari kondisi kerusakan sumber daya hayati laut yang terjadi di Indonesia dan kepentingan pangan berbasis maritim. Faktor eksternalnya adalah perkembangan isu lingkungan hidup global serta respon Indonesia.

Kondisi kerusakan sumber daya hayati laut yang terjadi di Indonesia menjadi faktor yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF. Melalui forum bersama dalam CTI-CFF upaya untuk mengatasi permasalahan di kawasan segitiga terumbu karang menjadi

lebih efektif mengingat kawasan tersebut bersifat konektivitas dan *transboundary*. Faktor internal selanjutnya adalah kepentingan pangan berbasis maritim. Indonesia dapat memaksimalkan kepentingannya untuk mencapai ketahanan pangan domestik dan global dengan adanya penanganan bersama terkait permasalahan pada sektor maritim yang merugikan melalui kerjasama CTI-CFF.

Perkembangan isu lingkungan hidup global serta respon Indonesia menjadi faktor eksternal yang mendorong peran aktif Indonesia dalam CTI-CFF. Konferensi Stockholm, Rio de Jeniero dan Protokol Kyoto merupakan beberapa konvensi yang menjadi dasar aturan penanganan permasalahan lingkungan hidup global. Pada konteks tersebut respon Indonesia cenderung adaptif yaitu mendukung adanya penanganan bersama terhadap permasalahan lingkungan hidup global yang salah satunya dengan berperan aktif pada kerjasama CTI-CFF. Hal tersebut berimplikasi pada citra positif Indonesia di mata internasional, peluang terhadap akses bantuan finansial dan akses terhadap organisasi terkait yang bergerak di bidang lingkungan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2014). *Ratifikasi segitiga terumbu karang : kerjasama antarnegara untuk dirikan sekretariat bersama*. Diakses pada 28 Juni 2016, dari <https://www.adb.org>.
- Afrianto, Denny. (2010). *Analisis Pengaruh Stok Beras, Luas Panen, Rata-Rata Produksi, Harga Beras dan Jumlah Konsumsi Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Tengah*. Semarang:UNDIP Works Press.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of decision*. Boston: Little, Brown Company.
- Amanda, I. (2010). *Analisa kebijakan luar negeri pada indonesia australia forest carbon partnership (IAFCF) tahun 2006-2008*. Diakses pada 11 Mei 2017, dari www.academia.edu.
- Antara Kaltim. (2014) *6 Negara CTI sepakat membentuk kelembagaan regional permanen*. Diakses pada 12 Maret 2016, dari <http://www.anatarakaltim.com>.
- Blinch, J. (2011). *The future of fish in Asia*. Singapore: Responsible Research.
- Burke, L., Reytar, K., Spalding, M., & Perry, A. (2012). *Reefs at risk revisited in the coral triangle*. WRI.
- Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP II). (2009). *Symposium coral reef management on CT area*. Jakarta.
- COREMAP. (2007). *Monitoring kondisi terumbu karang kawasan CTI-CFF*. Diakses pada Mei 2017 dari <http://www.coremap.or.id/>.
- CTI-CFF Indonesia. (2008). *Latar belakang*. Diakses pada 20 Januari 2017, dari nccctiindonesia.kkp.go.id.
- CTI-CFF. (2009). *Regional plan of action. CTI- Regional Plan of Action*.
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman hayati laut : aset pembangunan berkelanjutan indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Detik News. (2014, November 22). *SBY terima penghargaan di bidang lingkungan hidup dari UNEP*. Diakses pada 3 Maret 2017, dari <http://m.detik.com>.
- Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I. (2009, Mei 15 Mei-16 Juni). *Pemimpin negara CT-6 ukir komitmen lindungi wilayah coral triangle*. *Tabloid Diplomasi & Media Komunikasi*.
- Erwin, Muhamad. (2009). *Hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan*

- lingkungan hidup*. Bandung: Refika Aditama
- FAO.(2012).*Globefish Highlights*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan RI.Vol.6 No.01.
- Faripasha,E.(2009). Kebijakan luar negeri Indonesia teradap isu perubahan iklim global di era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (2004-2008)
- Foale, S., Adhuri, D., Alin˜o, P., Allison, E. H., Andrew, N., Cohen, P., et al. (2013). Food security and the coral triangle initiative. *Marine Policy*, 174-183.
- Greenpeace. (n.d.). *Laut Indonesia dalam krisis*. Jakarta: Greenpeace Southeast Asia (Indonesia).
- Hara, A. E. (2011). *Pengantar analisis politik luar negeri : dari realisme sampai konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- Kementerian Lingkungan Hidup RI. (2009). *Indonesia dan pertemuan segitiga terumbu karang*. Diakses pada 25 April 2016, dari www.menlh.go.id.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan lautan dalam Perspektif negara Kepulauan Republik Indonesia . *Jurnal Ilmiah Platax Vol. 1 ISSN: 2302-3589*.
- Magdalena,Tetty.(2016).*Kepentingan Aktif Indonesia dalam CTI (Coral Triangle Initiatives)*.JOM Fisip Vol.03 No.02.
- Mas'oeed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- NCC Indonesia. (2014). *Catatan perjalanan*.Diakses pada 5 Januari 2017, dari nccctiindonesia.kkp.go.id.
- Nikijuluw, V. P. (2013). Pendekatan inter-governmental dalam manajemen. In I. N. Committe, *Coral Governace* (pp. 281-316). Bogor: IPB Press.
- Rachman, H. P., & Ariani, M. (2002). Ketahanan pangan : konsep, pengukuran dan strategi. *FAE.Vol 20 No.1 Juli* , 12-24.
- Ridona. (2015). Efektifitas indonesia untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dalam coral triangle initiative on coral reefs, fisheries and food security (CTI-CFF). *JOM FISIP Volume 2 No. 2*.
- Rudianto, M. E. (n.d). Coral triangle inittitative on coral reefs, fisheries and food security.
- Satria, O. (2012). Motivasi australia mendukung program the coral triangle di kawasan asia pasifik tahun 2008-2012. *Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014*.
- Sindotrijaya. (2013). *Sektor pariwisata di kawasan segitiga terumbu karang menghasilkan 12 milyar US dollar pertahun*. Diakses pada 21 Desember 2016, dari Sindotrijaya.com.
- Slantchev, B. L. (2005, April 19). *Introduction to international relations : the rational actor model*.Diakses pada 8 Mei 2017, dari www.academia.edu.
- Susanto,H.(2011).*Progres pengembangan sistem kawasan konservasi perairan*.Indonesia :USAID Works Press.
- Tambunan, T. (2008). Ketahanan Pangan di Indonesia : Inti Permasalahan dan Alternatif Solusinya.
- United Nations. (1992). *The Rio Declaration on Environment and Development*. Dikases pada 20 Januari 2017, dari www.un.org.
- Witoelar, Rachmat. (2013). *Perubahan Iklim dan Tantangan Peradaban Bangsa*.Jakarta:Dewan Nasional Perubahan Iklim.
- World Research Insitute. (2013). *85% Terumbu karang di coral tringle tergolong "terancam"*. Diakses pada 6 Januari 2017 dari www.wri.org.